



## Hattrick, Kali Ketiga Kota Pontianak WTP

**PONTIANAK**-Pemerintah Kota Pontianak mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya. Hattrick. Senin (2/6) Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menerima penyerahan hasil audit dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Didi Budi Satrio.

Predikat WTP ini merupakan penilaian tertinggi yang diberikan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan Pemkot Pontianak tahun 2013. Sebelumnya untuk hasil audit laporan keuangan tahun 2011 dan 2012, Kota Pontianak juga mendapat predikat WTP. "Dari tujuh daerah yang selesai kami periksa, Kota Pontianak dan Landak predikatnya WTP. Sedangkan yang lainnya WDP (wajar dengan pengec-

ualian)," kata Joni Rindra Putra, Kepala Sub Auditorat BKP RI Perwakilan Kalbar.

Sambas, Bengkayang, Sekadau, Kuburaya, dan Ketapang adalah daerah yang mendapat predikat WDP. Akan tetapi WTP yang diberikan terhadap Pontianak dan Landak bukan cuma-cuma. BPK memberikan catatan terhadap predikat tersebut. "Pada dasarnya semua ada cata-

**WTP:** Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menerima hasil audit laporan keuangan dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar. Hasilnya, Kota Pontianak kembali mendapatkan WTP.

FOTO: IST

tan. Hampir semua daerah bermasalah pada pengelolaan aset," jelas Joni.

Pengelolaan aset pada daerah dianggap belum memadai, masih perlu ditingkatkan. Aset pula yang membuat lima daerah tersebut tidak mampu mencapai predikat WTP. Akan tetapi, untuk Pontianak dan Landak masalah pengelolaan aset

◆ Ke Halaman 7 kolom 5



## Hattrick, Kali Ketiga Kota Pontianak WTP

Sambungan dari halaman 1

dianggap masih wajar. "Masih bisa kami nilai kewajarannya," katanya.

Catatan lain yang diberikan kepada Pontianak adalah penyelesaian tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang belum selesai sejak diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke daerah. Terhadap catatan-catatan tersebut, BPK memberi waktu 60 hari agar ditindaklanjuti. "Tetapi tidak harus 60 hari. Paling tidak ada progresnya. Kami akui ada hal yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu itu, akan tetapi proses yang dilakukan disampaikan, agar dapat dinilai apakah sudah memadai atau belum," papar Joni.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menganggap mempertahankan WTP untuk kali ketiganya ini lebih sulit dari sebelumnya. Dia merasa ada

beban yang harus dikerjakan sehingga kualitas WTP kali ini sedikit berkurang dari tahun lalu. "Ruang lingkungannya semakin luas, anggaran digunakan juga semakin besar," katanya. Catatan yang diberikan BPK juga terasa berat, pasalnya ada piutang PBB senilai Rp62 miliar yang harus ditertibkan administrasinya. Tunggakan PBB tersebut sejatinya sudah dua tahun sejak penyerahan dari pusat ke daerah. "Sehingga kami harus memvalidasi tentang kebenaran, apakah bias ditagih atau tidak. Untuk memvalidasi itu dengan obyek pajak yang besar jumlahnya susah, apalagi tenaga kami sedikit, banyak yang sudah pensiun, kemudian moratorium pegawai lagi," tuturnya.

Masalah aset yang menjadi catatan BPK juga tidak serta-merta dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sutarmidji mencontohkan rumah susun

sederhana sewa (rusunawa) yang telah ditempati, ternyata belum diserahkan oleh kementerian terkait kepada Pemkot Pontianak. Catatan lainnya adalah peraturan daerah tentang penyerahan aset Kota Pontianak kepada PDAM Tirta Khatulistiwa. "Perda itu masih dalam proses. Meskipun banyak yang harus kami selesaikan, saya yakin ke depan kami akan berupaya untuk WTP dengan kualitas yang lebih baik," ujarnya.

Terhadap waktu 60 hari yang diberikan BPK untuk menyelesaikan catatan-catatan tersebut, Sutarmidji menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi untuk menyampaikan prosesnya. "Karena sebelumnya sudah kami sampaikan langkah-langkah yang akan dijalankan. Misalnya tentang PBB, kami akan lakukan validasi dengan pendampingan KPP Pratama," jelasnya. **(hen)**